

Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera

Vianita Dhifaf Aqilah Kasih

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu
vianitadhifaf@gmail.com

Yefriza

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu
yefriza@unib.ac.id

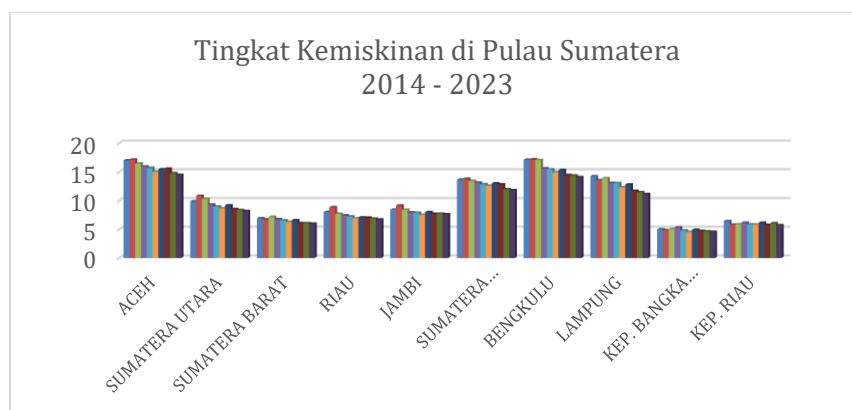
Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk, IPM, UMP, serta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di berbagai provinsi Pulau Sumatera. Data yang dipakai dalam temuan ini ialah data sekunder, metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel 10 Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2014 – 2023. Model yang dipakai ialah Random Effect Model (REM). Pengujian secara ekonometrika dilaksanakan uji asumsi klasik, dan hipotesisnya memakai uji-t, uji-F dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi positif antara jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Kedua, IPM memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan IPM berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. UMP berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif dan signifikan menunjukkan korelasi terbalik dengan tingkat kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwasanya peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan angka kemiskinan.

Kata Kunci *Jumlah Penduduk¹, IPM², UMP³, Pertumbuhan Ekonomi⁴, Kemiskinan⁵*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dan memiliki berbagai sumber daya yang berpotensi meningkatkan kemampuan ekonomi dan finansial. Namun, kemiskinan tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2023, terdapat 25,90 juta jiwa atau 9,36% dari total populasi yang tergolong miskin. Pulau Sumatera, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023). Beberapa provinsi di pulau ini, seperti Aceh (14,45%), Bengkulu (14,04%), dan Sumatera Selatan (11,78%), menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera Tahun 2014-2023 (Persen)

Sumber Data : Diolah Penulis, 2024

Dilihat dari pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Pulau Sumatera menjadi salah satu faktor yang memperlambat penurunan angka kemiskinan, sementara perbedaan kualitas hidup, yang dapat diukur melalui IPM, juga menjadi tantangan dalam pemerataan kesejahteraan. Di sisi lain, peningkatan UMP secara berkala dianggap sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun belum tentu kebijakan ini mampu memberikan dampak yang merata di seluruh provinsi. Tingkat kemiskinan tidak selalu berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di beberapa provinsi. Hal ini memberikan petunjuk bahwasanya keterkaitan ini lebih kompleks dan melibatkan berbagai faktor tambahan.

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada wilayah Jawa atau skala nasional secara umum, sementara kajian khusus yang mendalami Pulau Sumatera masih terbatas (Albab, 2019; Berhan, 2022). Kesenjangan ini menjadi landasan penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai berbagai faktor spesifik yang memengaruhi kemiskinan di pulau tersebut. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UMP, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder dari BPS selama 10 tahun terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika kemiskinan di wilayah tersebut serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kerangka teori yang mendasari penelitian ini berangkat dari teori *poverty trap* karya Nelson dan Leibstein (Bloom et al., 2021). Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan pesat populasi di negara berkembang dapat mengakibatkan tidak adanya peningkatan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat cenderung menurun, serta jumlah penduduk miskin bertambah. Selain itu, teori *human capital* akan digunakan untuk menganalisis bagaimana kualitas pendidikan dan kesehatan, yang diukur melalui IPM, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Kholifaturrohman et al., 2022). Adapun Teori lain yang relevan adalah teori distribusi pendapatan, dimana peningkatan UMP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan (Woyanti, 2016). Serta teori pembangunan ekonomi juga digunakan untuk menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata guna mengurangi kemiskinan (Amsari et al., 2024).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh jumlah penduduk, IPM, UMP, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera? Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis terkait kemiskinan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah ini.

LANDASAN TEORI

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan ialah keadaan ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar ini mencakup pangan, sandang, dan papan (Rahman et al., 2019). Selain itu, kemiskinan juga bisa diartikan sebagai kondisi ketidakberdayaan, ketidakadilan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan layanan (Dalimoenthe, 2023). Menurut (Susanto & Pangesti, 2019), terdapat dua macam teori tentang kemiskinan diantaranya ialah teori neo liberal dan teori sosial demokrat. Teori neo liberal menjelaskan kemiskinan sepenuhnya adalah masalah personal karena ketidakberdayaan dan juga pilihan individu tersebut. Dalam mengatasinya, kekuatan pasar harus diperluas secara maksimal dan pertumbuhan ekonomi harus didorong sebesar-besarnya, tetapi intervensi pemerintah harus minim.

Sedangkan teori sosial demokrat, memandang kemiskinan sebagai masalah struktural karena di dalam masyarakat terjadi ketimpangan dan ketidakadilan akses terhadap sumber daya. Teori ini menekankan keadilan pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan, termasuk di antaranya dalam bidang IPM. Teori ini mengakui bahwa pentingnya pendidikan agar setiap individu siap memasuki pasar tenaga kerja dan investasi pendidikan dianggap sebagai strategi mengurangi kemiskinan. Terdapat konsep budaya kemiskinan yang menggambarkan bahwa individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung terus berada dalam kondisi tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti kebiasaan malas bekerja, minimnya pendidikan, gaya hidup boros, serta kurangnya pandangan jauh ke depan (Asnawi, 2021).

Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk menjadi faktor signifikan yang berdampak pada tingkat kemiskinan di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang pesat seringkali menimbulkan masalah serius, terutama jika tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Yovita, 2021). Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja, mutu pendidikan, serta akses layanan kesehatan dan infrastruktur, berpotensi memperburuk kondisi ke-miskinan. Kenaikan jumlah penduduk yang tidak terkendali cenderung memperbesar tekanan terhadap sumber daya yang terbatas, seperti pangan, air, dan lahan (Dewi, 2023). Ketimpangan dalam distribusi sumber daya tersebut semakin memperparah kondisi masyarakat yang sudah rentan terhadap kemiskinan. Penduduk yang menetap di daerah dengan akses terbatas terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, mengalami hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat memicu berlanjutnya siklus kemiskinan antar generasi. Jumlah penduduk berpengaruh kuat terhadap tingkat kemiskinan, seperti yang didukung oleh berbagai penelitian terdahulu (Isramiwarti et al., 2017; Susanto & Pangesti, 2021; Widowati et al., 2020).

Adapun teori yang melandasi hipotesis ini ialah teori *poverty trap* yang dikembangkan oleh Nelson dan Leibstein, yang menggambarkan fenomena dimana suatu negara atau kelompok masyarakat terjebak dalam kemiskinan kronis karena tidak memiliki cukup sumber daya untuk keluar dari kondisi tersebut (Bloom et al., 2021). Pesatnya pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang memperburuk keadaan karena keterbatasan sumber daya yang harus dialokasikan kepada lebih banyak individu, yang berdampak pada penurunan produktivitas serta kesejahteraan secara umum. Dalam jangka panjang, tingkat kesejahteraan yang menurun ini akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, yang membuat masyarakat semakin sulit keluar dari siklus kemiskinan.

IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

IPM mencakup indikator-indikator seperti harapan hidup, tingkat melek huruf, dan standar kelayakan hidup (Lestari, 2020). IPM dapat diartikan sebagai representasi dari kualitas SDM. Kualitas SDM dapat menjadi faktor utama terjadinya kemiskinan. IPM berfungsi sebagai alat perbandingan kinerja pembangunan manusia di berbagai wilayah maupun negara (Sari,

2022). Menurut unsur-unsur dalam IPM, peningkatan pendidikan individu seringkali berhubungan erat dengan pendapatan yang diperoleh. Peningkatan kesehatan penduduk juga berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi dalam angkatan kerja. Kondisi ini akan mendorong produktivitas masyarakat serta meningkatkan pengeluaran konsumsi. Peningkatan pengeluaran konsumsi menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya IPM berdampak pada rendahnya produktivitas penduduk. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan, yang kemudian menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan dari (Aziz & Husenudin, 2024; Pasaribu et al., 2022; Ramdhani et al., 2022) yang menyebutkan bahwasanya terdapat pengaruh yang kuat antara IPM terhadap tingkat kemiskinan.

Adapun teori yang melandasi hipotesis ini ialah teori *human capital*, yang menggarisbawahi peran penting kualitas pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat (Kholifaturrohman et al., 2022). Modal manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan yang dimiliki individu, yang semuanya berkontribusi pada produktivitas dan penghasilan. IPM, yang digunakan sebagai ukuran kualitas pendidikan dan kesehatan, mencerminkan seberapa baik suatu negara dalam membangun modal manusia.

UMP Terhadap Tingkat Kemiskinan

UMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pekerja yang berada dalam kategori miskin (Chisti, 2018). Penetapan UMP bertujuan untuk memastikan standar hidup minimum terpenuhi, termasuk kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan efisiensi. Kenaikan UMP berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Ningtiyas & Anwar, 2021). Hal ini didukung oleh temuan dari (Husni et al., 2023; Janiar & Soelistiyo, 2017; Karimi et al., 2023) yang menyebutkan bahwasanya terdapat pengaruh yang kuat antara UMP terhadap tingkat kemiskinan.

Adapun teori yang melandasi hipotesis ini ialah teori distribusi pendapatan. Woyanti, (2016) menyoroti bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata, termasuk melalui kebijakan peningkatan UMP, dapat meningkatkan daya beli kelompok berpendapatan rendah. Diharapkan peningkatan UMP mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan daya konsumsi. Daya beli yang meningkat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan serta berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan. Kelompok ini mendapatkan akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa esensial.

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam mengukur kesuksesan pembangunan suatu negara atau wilayah. Peningkatan ekonomi diharapkan menjadi syarat utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Estrada & Wenagama (2020) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai fondasi bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Michael Lipton dalam teorinya mengenai pertumbuhan Pro-Poor menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang merata sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena akan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Penggabean, 2004). Teori ini diperkuat oleh hasil beberapa studi, seperti (Nainggolan, 2020; Ningsih & Andiny, 2018; Salsabil & Rianti, 2023). Hasil temuan ini membuktikan bahwasanya peningkatan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hipotesis yang dapat dirumuskan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan secara langsung berperan dalam mengurangi kemiskinan.

Adapun teori yang melandasi hipotesis ini ialah teori pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimana setiap lapisan masyarakat

dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Amsari et al., (2024) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang merata tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka makroekonomi seperti PDB, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan di antara berbagai kelompok sosial, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang inklusif memberikan jaminan akses layanan dasar bagi kelompok masyarakat miskin, mencakup pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang berperan penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini berjenis riset kuantitatif yang memanfaatkan data sekunder berasal dari BPS. Data yang dipakai dalam temuan ini yakni data dari BPS yang mencakup data terkait tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, IPM, UMP, dan pertumbuhan ekonomi di sepuluh provinsi di Sumatera selama periode 2014-2023. Selain data dari BPS, data sekunder juga didapatkan melalui buku, artikel, dan media internet. Guna menetapkan model regresi data panel yang paling tepat (CEM, FEM, atau REM), analisis dilakukan dengan menerapkan uji Chow dan Hausman pada temuan penelitian ini. Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dan heteroskedastisitas juga dilaksanakan. Guna menguji hipotesis temuan, analisis data dilaksanakan dengan memakai aplikasi Eviews 12. Metode analisis yang digunakan meliputi Uji F, Uji T, dan perhitungan Koefisien Determinasi R².

Adapun model persamaan regresi dapat disajikan pada persamaan berikut :

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 JP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \beta_4 PE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TK	: Tingkat Kemiskinan (Y)
JP	: Jumlah Penduduk (X1)
IPM	: IPM (X2)
UMP	: UMP (X3)
PE	: Pertumbuhan Ekonomi (X4)
i	: Daerah (<i>cross section</i>)
t	: Tahun (<i>time series</i>)
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien regresi
μ	: Error term

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian menggunakan pendekatan CEM, FEM, dan REM, model terbaik yang terpilih yaitu model REM. Setelah di lakukan uji asumsi klasik pada penelitian ini maka dinyatakan lulus uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Temuan ini memakai analisis regresi linier berganda. Analisis ini meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Melalui pengolahan data yang telah dilakukan memakai program E-Views 12.

Hasil Uji T

Tabel 1. Hasil Estimasi Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.39930	2.746440	14.34559	0.0000
X1	0.428890	0.197105	2.175941	0.0320
X2	-0.425166	0.030193	-14.08176	0.0000
X3	-0.004382	0.163373	-0.026822	0.9787
X4	-0.047973	0.020637	-2.324636	0.0222

Sumber: Data diolah, 2024

Berbagai faktor berikut mempengaruhi tiap variabel independen terhadap tiap variabel dependen:

Hasil uji t pada variabel jumlah penduduk (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.175941 < t tabel yaitu 1.984467 dan nilai sig. 0.0320 < 0.05, maka dapat diartikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di pulau sumatera.

Hasil uji t pada variabel IPM (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar -14.08176 < t tabel yaitu 1.984467 dan nilai sig. 0.0000 < 0.05, maka dapat diartikan bahwa IPM berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di pulau sumatera.

Hasil uji t pada variabel UMP (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar -0.026822 < t tabel yaitu 1.984467 dan nilai sig. 0.9787 > 0.05, maka dapat diartikan bahwa UMP tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di pulau sumatera.

Hasil uji t pada variabel pertumbuhan ekonomi (X4) diperoleh nilai t hitung sebesar -2.324636 < t tabel yaitu 1.984467 dan nilai sig. 0.0222 < 0.05, maka dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di pulau Sumatera.

Hasil Uji F

Tabel 2. Hasil Estimasi Random Effect Model

R-squared	0.712012
Adjusted R-squared	0.699886
S.E. of regression	0.389799
F-statistic	58.71876
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai f tabel sebesar 58.71876 lebih besar daripada f hitung sebesar 2.467494. Selain itu, nilai signifikan 0.00000 lebih rendah daripada 0.05. Ini memberikan petunjuk bahwasanya variabel ini memengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien detirminasi menunjukan suatu ukuran yang menjelaskan besar variasi variable dependen yaitu Tingkat Pengangguran yang mampu dijelaskan oleh Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera.

Tabel 3. Hasil Estimasi Random Effect Model

R-squared	0.712012
Adjusted R-squared	0.699886
S.E. of regression	0.389799
F-statistic	58.71876
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai *adjusted R-Square* sebesar 0.712012 atau 71,2012%. Variabel independen yang terdiri dari jumlah penduduk, IPM, UMP, dan pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi sebesar 71,2012% dalam menjelaskan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Artinya, berbagai faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Sisanya, 28,7988%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model temuan.

Pembahasan

$$Y = 39.3993 + 0.4289 \cdot X_1 - 0.4252 \cdot X_2 - 0.0044 \cdot X_3 - 0.0480 \cdot X_4$$

Analisa nilai koefisien regresi tersebut bisa di simpulkan sebagai berikut:

Analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,4289%. Sebaliknya, peningkatan IPM sebesar 1% berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, yakni penurunan sebesar 0,4252%. Sementara itu, kenaikan UMP sebesar 1% juga berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, namun dengan pengaruh yang lebih kecil, yaitu penurunan sebesar 0,0044%.

Tabel 4. Hasil Estimasi Random Effect Model

No	provinsi	<i>Effect (C)</i>
1	ACEH	5,91624351010
2	BENGKULU	6,01932880561
3	JAMBI	-1,70719358894
4	KEP. BABEL	-4,56251345531
5	KEP. RI	-1,67283230003
6	LAMPUNG	1,55409096835
7	RIAU	-2,23507436603
8	SUMBAR	-3,06194531187
9	SUMSEL	1,83886070315
10	SUMUT	-2,08896496505

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 8 memperlihatkan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Bengkulu dengan nilai 6,0193. Provinsi Aceh menempati posisi kedua dengan nilai efek sebesar 5,9162. hal ini dikarenakan indeks pembangunan manusia di bengkulu dan aceh masih rendah menyebabkan sulitnya masyarakat mendapat pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata merupakan faktor utama yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu dan Aceh, karena pertumbuhan ekonomi belum merata di Bengkulu dan Aceh ini menyebabkan sulitnya masyarakat yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dua provinsi memiliki nilai efek terendah: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan -4,5625 dan Provinsi Sumatera Barat dengan -3,0619. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak SDA, seperti batu bara dan minyak bumi, dan memiliki banyak potensi pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada provinsi ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil Regresi Random effect model (REM), menunjukan koefisien dari variabel tingkat pendidikan sebesar 1.984467 dan probabilitas 0.0320. Penelitian menunjukkan adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan angka kemiskinan di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Studi sebelumnya oleh (Isramiwarti et al., 2017), menemukan bahwa jumlah penduduk memengaruhi tingkat kemiskinan, dan bahwa ketika jumlah penduduk berkurang, tingkat kemiskinan juga akan menurun. Hasil penelitian (Susanto & Pangesti, 2021),

menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan. Temuan serupa juga dilaporkan oleh (Widowati et al., 2020), yang mengkonfirmasi pengaruh signifikan jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Penelitian ini mendukung hipotesis bahwa jumlah penduduk memengaruhi kemiskinan di Pulau Sumatera. Menurut teori *poverty trap* yang dikemukakan Nelson dan Leibenstein, pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, peningkatan tekanan pada SDA, serta melemahnya kualitas modal manusia. Kondisi ini pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah tingkat kemiskinan.

Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil dari Regresi REM memberikan petunjuk bahwasanya koefisien variabel IPM sebesar -14.08176 dengan probabilitas 0.0000. Analisis data memberikan petunjuk bahwasanya peningkatan IPM di Pulau Sumatera berkorelasi negatif dengan penurunan angka kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya meningkatkan IPM secara signifikan dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut

Hasil temuan ini konsisten dengan berbagai temuan sebelumnya yaitu dari Aziz & Husenudin (2024), Pasaribu et al., (2022), Ramdhani et al., (2022), yang secara empiris membuktikan terdapat pengaruh signifikan antara IPM dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menghasilkan temuan yang sejalan dengan hipotesis, yakni IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Berdasarkan teori *human capital*, peningkatan kualitas SDM terbukti efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Individu dengan taraf pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi biasanya lebih mempunyai peluang kerja yang baik dan pendapatan yang lebih tinggi.

Pengaruh UMP Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi REM, kenaikan UMP tidak memberikan dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Koefisien negatif yang didapatkan, yaitu -0.026822, memberikan petunjuk bahwasanya ada hubungan yang sangat lemah antara kedua variabel.

Hasil studi Husni et al., (2023), Janiar & Soelistiyo (2017), serta Karimi et al., (2023), yang menunjukkan korelasi kuat antara UMP dan tingkat kemiskinan, bertentangan dengan temuan ini. Hasil temuan ini juga tidak selaras dengan teori distribusi pendapatan, di mana peningkatan UMP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak semua pekerja mendapat upah minimum. Banyak pekerja di sektor informal atau yang tidak memiliki perlindungan hukum seringkali tidak menerima upah minimum yang telah ditetapkan. Pekerja-pekerja ini cenderung berada dalam kelompok yang paling rentan, sehingga kebijakan upah minimum mungkin tidak berdampak langsung pada mereka penelitian ini sejalan dengan penelitian (fitriana, 2021) (Utami & Rofiuddin, 2022) yang memberikan pernyataan bahwasanya UMP tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil estimasi model regresi memberikan petunjuk bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera memberikan dampak negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Koefisien regresi yang bernilai negatif dan signifikan secara statistik ($p\text{-value} < 0,05$) memperkuat hipotesis bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

Penelitian di Pulau Sumatera, yang dilakukan oleh Nainggolan (2020), Ningsih & Andiny (2018), serta Salsabil & Rianti (2023), secara konsisten memberikan petunjuk bahwasanya pertumbuhan ekonomi berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil ini mendukung hipotesis awal mengenai pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Temuan ini mendukung teori pembangunan ekonomi yang menekankan

pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata dalam upaya pengurangan kemiskinan.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera periode 2014-2023 menunjukkan beberapa temuan menarik. Pertama, terdapat korelasi positif antara jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Kedua, IPM memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan IPM berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan. UMP berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif dan signifikan menunjukkan korelasi terbalik dengan tingkat kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwasanya peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan angka kemiskinan.

Besaran koefisien dari seluruh variabel dapat diketahui dari hasil R^2 , yang menunjukkan nilai sebesar 71,2012%. Sementara itu, sisa 28,7988% adalah hasil dari variabel tambahan yang tidak dimasukkan dalam model temuan ini.

Saran

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah membuat kebijakan di Pulau Sumatera yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Peneliti berikutnya yang mengkaji kemiskinan di Pulau Sumatera diharapkan memperluas objek dan variabel penelitian, agar mampu menyajikan hasil yang lebih menyeluruh mengenai fenomena kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, M. K. U. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018*. Universitas Islam Indonesia.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- Asnawi, M. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2011-2020*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450–1466.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2023*. Jatim.Bps.
- Berhan, R. A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2001-2020*. Universitas Islam Indonesia.
- Bloom, D. E., Khoury, A., Kufenko, V., & Prettnner, K. (2021). Spurring Economic Growth Through Human Development: Research Results and Guidance for Policymakers. *Population and Development Review*, 47(2), 377–409.
- Chisti, N. S. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus pada 6 Provinsi di Pulau Jawa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 1–13.
- Dalimoenthe, I. (2023). *Pengantar Ilmu Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Dewi, I. R. (2023). Mengupas Kemiskinan di Provinsi Banten: Bagaimanakah Peran Faktor Kependudukan dan Ekonomi? *Ecoplan*, 6(2), 100–117.
- Estrada, A. A. E., & Wenagama, I. W. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(2), 233–261.
- Husni, A. H. A. A., Rusli, A. M., Syamsu, S., & Ansar, M. C. (2023). Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 275–298.

- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 SD 2015. *PEKBIS*, 9(3), 195–213.
- Janiar, L. V., & Soelistiyo, A. (2017). Analisis Penguatan Peran Kelembagaan Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu EKonomi JIE*, 1(3), 352–364.
- Karimi, K., Mulyani, P., Murialti, N., & Tibrani. (2023). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 107–116.
- Kholifaturrohman, R., Floresti, D. A., Mayasari, V., & Rosiana, M. (2022). Kontribusi Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendidikan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 24(4), 85–93.
- Lestari, D. D. (2020). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Nainggolan, E. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019). *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya: Penelitian Ilmu Manajemen*, 6(2), 89–99.
- Ningrum, R. A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 190–196.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 53–61.
- Ningtias, E. N. A., & Anwar, A. F. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(1), 1–12.
- Pasaribu, S., Akbar, A. J., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 155–162.
- Penggabean, M. S. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia.
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi*, 8(1), 93–103.
- Rahayu, D. A. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). Kemiskinan dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542–1548.
- Ramdhani, N., Anggraeni, Y., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 136–144.
- Rizal, A., & Yantieka, N. (2022). Analisis Regresi Data Panel untuk Pemodelan Kemiskinan Pulau Sumatera dengan Variabel Pendidikan Tahun 2016–2021. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 1(7), 518–529.
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Sah Media.
- Salsabil, I., & Rianti, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 15–24.
- Sari, L. P. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2002-2021. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 567–574.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340–350.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271–

278.

- Utami, I. T., & Rofiuddin, M. (2022). Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(3), 145–160. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i3.463>
- Widowati, A. E., Juliprijanto, W., & Destiningsih, R. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(1), 95–108.
- Woyanti, N. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMP Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Pra dan Pasca Desentralisasi Fiskal. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 28(2), 28–43.
- Yovita, K. (2021). *Pengaruh Pengangguran, Inflasi, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2019*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.